

**Analisis Network Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Di
Kabupaten Bintan
(Studi Kasus : Desa Wisata Ekang Anculai)**

Hafiani Septi Yendri¹, Yoggie Detra Winata², Andi Wuleng Matappa³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara/FISIP/Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: hafianisepti7@gmail.com

Kata kunci

*Desa wisata, network
governance,
pariwisata*

Keywords

*Tourist village,
network governance,
tourism*

Abstrak

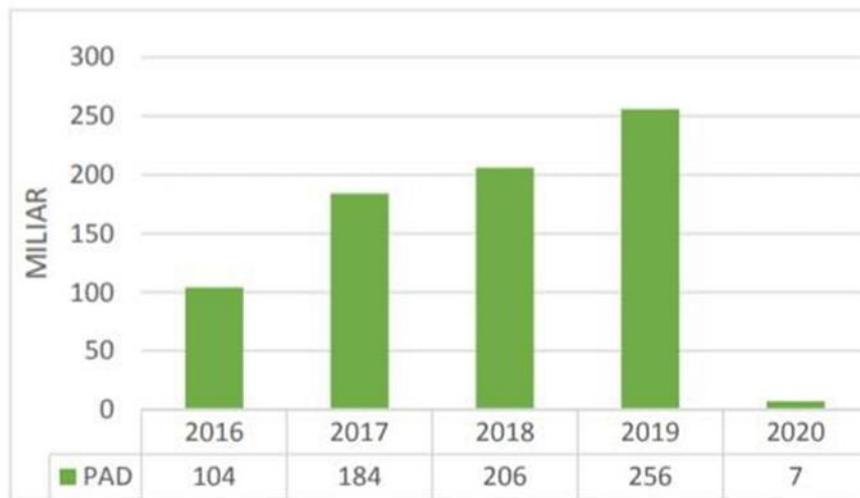
Konsep "desa wisata" mengacu pada pengembangan wilayah dengan tujuan menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Masyarakat desa diharapkan dapat berkembang dengan mengelola seluruh daya tarik wisata dengan benar. Pulau Bintan juga memiliki banyak desa wisata. Beberapa di antaranya adalah Desa Wisata Ekang Anculai dan Desa Wisata Pengudang, dan lain lain. Namun, data menunjukkan bahwa Pulau Bintan masih jauh dari jumlah kunjungan wisatawan dibandingkan dengan daerah lainnya. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sistem pemerintahan berperan dalam pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berarti bahwa hasilnya adalah data deskriptif. Sumber primer dan sekunder dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data menggunakan model proses analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan (Sugiyono, 2010:91). Pertama, data direduksi; ini berarti memilih dan merangkum data yang penting, lalu membuat kategori. Kedua, penyajian data, atau penampilan data, adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih terorganisir. Terakhir, penarikan atau verifikasi kesimpulan.

Abstract

The concept of "tourist village" refers to regional development with the aim of making a village a tourist destination. Village communities are expected to develop by managing all tourist attractions properly. Bintan Island also has many tourist villages. Some of them are Ekang Anculai Tourism Village and Pengudang Tourism Village, and others. However, data shows that Bintan Island is still far behind in the number of tourist visits compared to other areas. The focus of this research is to see how the government system plays a role in the development of Tourism Villages in Bintan Regency. This research uses a descriptive qualitative approach, which means that the results are descriptive data. Primary and secondary sources can be used to collect data. The data analysis technique uses the Miles and Huberman data analysis process model, which consists of three stages (Sugiyono, 2010:91). First, the data is reduced; this means selecting and summarizing important data, then creating categories. Second, data presentation, or data appearance, is presenting data in a more organized form. Finally, draw or verify conclusions..

Pendahuluan

Bintan merupakan salah satu pulau yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Bintan sangat diagung-agungkan karena sektor pariwisatanya. Sektor pariwisata sangat membantu Bintan dalam meningkatkan ekonominya.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2020

Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah Di Sektor Paariwisata Kabupaten Bintan 2016-2020

Berdasarkan grafik diatas, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sektor pariwisata terus mengalami pertumbuhan. Hanya saja terhenti saat Covid-19 melanda, hal ini disebabkan oleh ditutupnya aktivitas dan perjalanan orang/manusia. Begitu juga dengan desa wisata E kang Anculai, Desa Wisata ini merupakan salah satu penyumbang PAD yang besar terhadap Bintan.

Konsep "desa wisata" mengacu pada pengembangan wilayah dengan tujuan menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Masyarakat desa diharapkan dapat berkembang dengan mengelola seluruh daya tarik wisata dengan benar. sesuai dengan prinsip desa wisata, desa membangun. Prinsip ini menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif yang disesuaikan dengan sumber daya dan potensi lokal. Ada banyak definisi untuk desa wisata. Desa wisata menurut Suyanti (2013), didefinisikan sebagai lingkungan dengan karakteristik alam dan budaya yang unik sehingga wisatawan dapat menikmati mengenal, menghayati, dan mempelajari kekhasan desa dan semua daya tariknya.

Dalam membangun desa wisata, ada tiga hal yang harus diperhatikan:

a. Kondisi desa

Pihak desa harus memiliki data yang jelas tentang kondisi desa dan bagaimana ekosistem dapat mendukung lokasi wisata untuk mengetahui potensi wisata.

b. Keadaan masyarakat dan struktur organisasi

Dalam pengembangannya, desa wisata diharapkan dapat dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun organisasi untuk mengelola desa wisata dan memiliki masyarakat siap untuk mengelolanya.

c. Konsep desa wisata yang unik

Konsep ini akan membuat desa wisata berbeda dari yang lain.

Dengan posisinya sebagai salah satu gerbang wisata Indonesia, Pulau Bintan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat wisata belanja dan perjalanan lintas negara. Jumlah wisatawan dari luar negeri menunjukkan betapa cerah masa depan pariwisata Pulau Bintan.

Pulau Bintan juga memiliki banyak desa wisata. Beberapa di antaranya adalah Desa Wisata Ekang Anculai dan Desa Wisata Pengudang, antara lain. Desa Wisata Ekang berada di Desa Ekang Anculai di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Wisata ekang merupakan wisata yang berbasis masyarakat. Desa Wisata Ekang berada di jalur alternatif dari kota Tanjung Pinang ke kawasan wisata eksklusif Lagoi dengan bantuan pemerintah untuk meningkatkan kelestarian dan kecintaan terhadap lingkungan alam, adat istiadat, dan budaya. Di sana kita juga dapat mempelajari dan menikmati beberapa tempat wisata, yang cocok untuk kegiatan sekolah, universitas, dan masyarakat umum.

Bandara	Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk (Orang)		
	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾
Jumlah	4 052 923	1 557 530	5 889 031
Bandara Lainnya	2 221 823	1 435 624	2 162 907
Batam	295 336	2 582	562 920
Kualanamu	41 427	218	74 498
Ngurah Rai	1 059 198	43	2 154 045
Soekarno Hatta	435 139	119 063	934 661

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jendral Imigrasi) dan Hasil MPD

Gambar 2. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia

Jika dilihat dari data diatas maka dapat dilihat masih sangat tertinggalnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bintan jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan ke daerah lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi ? apa yang mendasari ketertinggalan Bintan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis network governance dalam pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bintan, khususnya desa wisata Ekang Anculai. Ekang anculai adalah salah satu Desa Wisata yang mengangkat tema berbeda dari desa wisata lainnya yang ada di Bintan, Bintan sangat dikenal dengan wisata pantainya karena sebagian besar wilayah Kepulauan Riau adalah lautan/perairan. Bereda dengna Desa Wisata Ekang Anculai, Desa Wisata ini memiliki branding wisata bambu buatan yang bernuansa alam.

Pitana dan Gayatri (2008;92) mengatakan bahwa pemerintah mempunyai peran untuk mengembangkan pariwisata didaerahnya sebagai:

- a) Fasilitator, sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yaitu menyediakan berbagai fasilitas, baik fasilitas fisik aatau non fisik yang bisa digunakan untuk mendukung program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman demi pengembangan pariwisata.

- b) Dinamisator, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik agar pembangunan yang ada berlangsung dengan baik, sektor publik, sektor swasta, dan sektor swasta harus bekerja sama dengan baik. Di antara pemangku kepentingan pembangunan pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ketiga pihak tersebut bekerja sama dengan baik sehingga tercipta simbiosis timbal balik dalam pengembangan pariwisata.
- c) Selain itu, sebagai motivator, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus berfungsi untuk memastikan bahwa perekonomian pariwisata tetap berjalan.

Dalam pengembangan desa wisata, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, serta kelompok sadar wisata / badan usaha milik desa terkait

Menurut Peraturan Bupati Bintan Bab VI Pasal tentang Pengembangan Desa Wisata atau Kampung Wisata dapat dikakukan melalui:

- a) Pengembangan infrastruktur Desa Wisata atau Kampung wisata;
- b) Pemasaran Desa Wisata atau Kampung Wisata;
- c) Penguatan kelembagaan Desa Wisata atau Kampung Wisata; dan
- d) Kerjasama kemitraan; dan
- e) Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata atau Kampung Wisata

Setelah UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah menjadi lebih sulit dan rumit. Untuk mendorong pariwisata lokal, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk membuat rencana pembangunan pariwisata yang matang.

Perkembangan pemerintahan abad ke-21 berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Ada tiga pilar yang menopang kemampuan suatu bangsa untuk melaksanakan Good Governance: pemerintah, masyarakat sipil, dan pasar atau dunia usaha. namun Network governance di Indonesia menurut Sholihatin (2012:15) maksimal berjalan dengan semestinya.

Network governance untuk pengelolaan jaringan berasal dari studi implementasi dan hubungan antar pemerintah (E. Klijn & Koppenjan, 2000). Ide jaringan digunakan untuk menggambarkan pola hubungan antar organisasi dan mengevaluasi bagaimana pola hubungan tersebut berdampak pada proses kebijakan. Kebijakan yang muncul dalam hubungan tersebut adalah hasil dari interaksi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam hubungan tersebut. Metafora jaringan dengan cepat menyebar ke semua bidang ilmu sosial (Klijn, 1996; Klijn & Koppenjan, 2000).

Untuk menjalankan strategi network governance, ada tiga pendekatan pengelolaan, yaitu memulai dan mendorong proses komunikasi antara aktor; membuat dan mengubah jadwal jaringan untuk mengoptimalkan koordinasi; dan menciptakan konten baru (Klijn E. H., 2012).

1. Mengawali dan memfasilitasi proses interaksi antar aktor yang terlibat dalam jaringan. Digunakan untuk memfasilitasi para aktor yang terlibat, memfasilitasi ide yang muncul serta kegiatan yang dilakukan
2. Membangun kegiatan dan rencana jaringan untuk meningkatkan koordinasi.

Strategi ini membuat kegiatan di seluruh jaringan sehingga dapat mengelola dan berkoordinasi dengan jaringan dengan peraturan yang mengatur antar jaringannya

3. Membuat konten semakin baik

Dilakukan untuk pengelolaan konten digital jaringan sehingga dapat memperluas informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Ketiga pendekatan yang relevan ini dievaluasi dalam pengawasan partisipatif. Menurut pemahaman ini, setiap aktor atau organisasi akan berusaha memanfaatkan sumber daya atau sumber daya yang dimiliki oleh institusi lain dalam jaringannya untuk mencapai tujuan atau pencapaian yang telah ditetapkan.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas membuat penulis ingin meneliti permasalahan yang terjadi dengan mengaitkan Network governance dalam pengembangan Desa wisata di Kabupaten Bintan, khususnya Desa Wisata Ekang Anculai, dengan penelitian yang berjudul **Analisis Network Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus : Desa Wisata Ekang Anculai)**

Metode

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif . Dengan kata lain, tujuan dari data deskriptif penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap hubungan pemerintahan dalam proses pembangunan Desa Wisata Ekang Anculai di Kabupaten Bintan.

Data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui iteratur peneitian.

Analisis data yang digunakan adalah model proses Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah (Sugiyono, 2010:91). Pertama, memilih, merangkum, dan membuat kategori dari data yang penting. Kedua, penyajian data, juga dikenal sebagai penampilan data, berarti menampilkan data dalam bentuk yang lebih terorganisir. Terakhir, verifikasi atau penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Desa wisata Ekang Anculai adalah salah satu desa wisata yang terletak di Kabupaten Bintan, Ekang Anculai adalah desa wisata yang dikelola pemerintah bersama dengan masyarakat, pokdarwis, dan privat yang dalam hal ini adalah D'Bamboo. Desa wisata ekang Anculai merupakan desa wisata yang cukup ramai pengunjung asingnya sebelum adanya Wabah Covid-19, namun setelah Covid-19 mewabah, jumlah kunjungan menurun drastis karena ditutupnya perjalanan orang/manusia.

Berdasarkan hasil wawancara, Menurut Ardiansyah selaku Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Ekang Anculai merupakan salah satu desa wisata penyumbang PAD yang besar, menurut data yang Disbudpar dapatkan pada 2019 (sebelum Covid-19 melanda), profit yang didapat oleh Desa Wisata Ekang Anculai mencapai 200 juta Rupiah. Bagaimana Desa Wisata Ekang Anculai dapat kembali berkembang? Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama Kabid Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, berikut analisis network governance dalam pengembangan Desa Wisata Ekang Anculai.

Jaringan (networks) adalah sebuah instrument menaggabungkan beberapa aktor untuk bekerja bersama dan beinteraksi untuk mencapai tujuan bersama (Kickert, Klijn). Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Kepala Divisi Bidang Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, adapun aktor-aktor yang bekerjasama dalam pengembangan desa wisata Ekang Anculai diantaranya sebagai berikut.

1. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini ialah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Disbudpar berperan dalam memfasilitasi, mendorong penanaman modal, pengembangan pariwisata, pengadaan promosi wisata melalui event-event, sosial media, dan pengembangan potensi pariwisata.

2. Swasta

Dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata Ekang Anculai, Disbudpar bekerjasama dengan pihak swasta yang dalam hal ini adalah D'Bamboo. Untuk pengelolaannya, Disbudpar menyerahkan sepenuhnya pengelolaan terhadap D'Bamboo.

3. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

D'Bamboo juga bekerja sama dengan BUMDES setempat dalam hal pemodalan. BUMDES berinvestasi di Desa Wisata Ekang Anculai melalui D'Bamboo, yang ada akhirnya profit dibagi berdasarkan modal yang diberikan.

4. Masyarakat

Masyarakat juga ikut bekerjasama dalam pengembangan desa wisata Ekang Anculai ini melalui Pokdarwis, pihak D'Bamboo melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata Ekang Anculai melalui cara dengan menghimbau masyarakat tempatan untuk bekerja di D'Bamboo. Pemerintah juga berharap agar nantinya muda mudi setempat yang ikut bekerja disana dapat mengambil pelajaran melalui pengalamannya, sehingga memungkinkan untuk menciptakan desa wisata baru disekitarnya.

5. Instrumen lainnya

Instrumen lain yang ikut bekerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata ekang anculai adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah juga bekerjasama dengan BPS untuk meninjau jumlah kunjungan yang datang kesana, sebagai pedoman dalam pengembangan desa wisata itu sendiri.

3 (tiga) pendekatan network governance yakni *initiating and facilitating interaction processes between actors; creating and changing network arrangements for better coordination; creating new content* (Klijn E. H., 2012). Berdasarkan hasil wawancara, berikut analisis strategi network governance dengan 3 pendekatan yang diantaranya adalah sebagai berikut.

1. *Initiating and facilitating interaction processes between actors* (Memulai dan memfasilitasi proses interaksi antar aktor)

Dalam memfasilitasi interaksi antar aktor yang bekerjasama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan bekerjasama dengan Dinas PMD (Pemberdayaan

Masyarakat Desa). Upaya ini dilakukan dengan maksud agar Dinas PMD memberikan pemahaman pada BUMDES BUMDES setempat, agar mau berkolaborasi dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata ekang anculai, selain Dinas PMD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga bekerjasama dengan sektor privat yang dalam hal ini adalah D'Bamboo, pokdarwis, dan masyarakat setempat agar dapat bersinergi dan bekerjasama dalam pengembangan desa wisata Ekang Anculai. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan juga melakukan koordinasi dan komunikasi intens kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata Ekang Anculai, terkait permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi, dan bantuan apa yang mereka perlukan sebagai upaya penyelesaiannya.

2. *Creating and changing network arrangements for better coordination* (Membuat dan mengubah pengaturan jaringan untuk koordinasi yang lebih baik)

Desa wisata Ekang Anculai mengalami kemerosotan yang besar saat Covid-19 melanda, hal ini membuat pemerintah perlu mengubah pengaturan jaringan untuk koordinasi yang lebih baik di era new normal ini. Dalam hal ini pemerintah melalui Disbudpar bekerja sama dengan pihak pengelola dalam hal kebaharuan yang perlu dilakukan dan diadakan di Desa Wisata Ekang Anculai, contoh kebaharuan tersebut ialah dengan pengadaan tempat-tempat cuci tangan dan handsanitizer dibanyak sudut disana, hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya peningkatan kepercayaan pengunjung terhadap kesterilan tempat wisata tersebut.

Disbudpar juga membuat pengaturan baru untuk koordinasi bersama Dinas-Dinas lainnya dengan cara menyelipkan instrumen-instrumen promosi wisata berupa poster dan baleho pada event-event yang dibuat pemerintah, terkait kebaharuan yang ada di Desa Wisata Ekang Anculai, ini bertujuan untuk memperkenalkan dan membangun kepercayaan masyarakat kembali terhadap kesterilan dan keamanan tempat wisata tersebut. Upaya ini juga dilakukan melalui media sosial Disbudpar itu sendiri.

3. *Creating new content* (Membuat konten baru)

Dalam membuat konten baru, pemerintah serta pihak pengelola melakukan upaya melalui pembuatan event-event, yang nantinya diselipkan konten terkait desa wisata yang ada di Bintan, yang salah satunya adalah Desa Wisata Ekang Anculai ini. Selain itu, pemerintah bersama D'Bamboo juga melakukan kerjasama dengan influencer-influencer untuk memperkenalkan kembali, memasarkan kebaharuan dan memberitahukan kepada masyarakat luas melalui media sosial, bahwa Desa Wisata Ekang Anculai sudah bisa dikunjungi kembali.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa network governance serta strategi network governance dalam pengembangan desa wisata Ekang Anculai sudah berjalan cukup baik. Semua pihak yang terlibat telah melakukan perannya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Saat ini, pemerintah, D'Bamboo dan pihak-pihak terlibat tengah berupaya meningkatkan kembali jumlah kunjungan ke Desa Wisata Ekang Anculai setelah covid-19 mewabah.

Simpulan

Desa wisata Ekang Anculai adalah salah satu desa wisata yang terletak di Kabupaten Bintan, Ekang Anculai adalah desa wisata yang dikelola pemerintah bersama dengan masyarakat, pokdarwis, dan privat yang dalam hal ini adalah D'Bamboo. Desa wisata ekang Anculai merupakan desa wisata yang cukup ramai pengunjung asingnya sebelum adanya Wabah Covid-19, namun setelah Covid-19 mewabah, jumlah kunjungan menurun drastis karena ditutupnya perjalanan orang/manusia.

Berdasarkan hasil wawancara, Menurut Ardiansyah selaku Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Ekang Anculai merupakan salah satu desa wisata penyumbang PAD yang besar, menurut data yang Disbudpar dapatkan pada 2019 (sebelum Covid-19 melanda), profit yang didapat oleh Desa Wisata Ekang Anculai mencapai 200 juta Rupiah.

Jaringan (networks) adalah sebuah instrument menaggabungkan beberapa aktor untuk bekerja bersama dan beinteraksi untuk mencapai tujuan bersama (Kickert, Klijn). Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Kepala Divisi Bidang Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, adapun aktor-aktor yang bekerjasama dalam pengembangan desa wisata Ekang Anculai diantaranya adalah pemerintah, privat (swasta), BUMDES, masyarakat, dan instrumen lainnya.

Berdasarkan hasil analisis dibagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa network governance serta strategi network governance dalam pengembangan desa wisata Ekang Anculai sudah berjalan cukup baik. Semua pihak yang terlibat telah melakukan perannya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Referensi

- Ajis Setiawan, C. S. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Waduk Penjalin Di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan . Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi.
- Andre Ariesmansyah, R. H. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA. Jurnal El-Riyasah.
- Aninda Diah Maharani Utami, D. H. (n.d.). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Bintan, P. K. (n.d.). pada Peraturan Bupati Bintan No.31 Tahun 2022 pada Bab V Pasal 10 dan Bab VI Pasal 12. .
- Cintantya Andhita Dara Kirana, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. : Jurnal Administrasi Publik.
- Dory Gurvantry, A. F. (2022). ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN DESA WISATA. Jurnal of public Administration study.
- Fajrina Risanti dan Fransisca Winarni, M. F. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA WUKIRSARI DI KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL. Collaborative Governance dalam....
- Falda Wisnu Ardiansyah, H. P. (2022). ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI DEWA RUCI JATIMALANG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO.

- Mahadiansar, A. F. (2022). Kajian Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Bintang Berbasis Network Governance dalam masa covid 19. Samudra Biru.
- Prasetyo, N. D. (2022). ANALISIS PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LIMBASARI KECAMATAN BOBOTSARI.
- Putri, R. A. (2022). Kajian Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Bintang Berbasis Network Governance dalam Masa COVID-19. In A. F. Mahadiansar, Kajian Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Bintang Berbasis Network Governance dalam Masa COVID-19. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Setyowati, A. M. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA. Jurnal Kebijakan Publik.